



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 222/PL.02.3-BA/64/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta



- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



ANASASIA JUWITA PUTRI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 111 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN                       | RINCIAN |   |     |   | JUMLAH (Rp.) |                |
|----|---------------------------------------|---------|---|-----|---|--------------|----------------|
|    |                                       |         |   |     |   |              |                |
| 1. | Pertemuan Terbatas                    | 2.000   | x | 150 | x | 43.000       | 12.900.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog       | 1.000   | x | 300 | x | 43.000       | 12.900.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye              | 1       | x | 30% | x | 2.821.202    | 84.636.060.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 1.000   | x |     |   | 150.000      | 150.000.000    |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye       | 1.038   | x |     |   | 500.000      | 519.000.000    |

| NO | URAIAN KEGIATAN   | RINCIAN |   |               |   |            |                | JUMLAH (Rp.) |
|----|---|---------|---|---------------|---|------------|----------------|--------------|
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi   | 1       | x | 5.000.000.000 |   |            | 5.000.000.000  |              |
| 7. | Alat Peraga Kampanye  |         |   |               |   |            |                |              |
|    | a. Reklame  | 200%    | x | 50            | x | 18.000.000 | 1.800.000.000  |              |
|    | b. Spanduk  | 200%    | x | 2.076         | x | 319.000    | 1.324.488.000  |              |
|    | c. Umbul-Umbul  | 200%    | x | 2.100         | x | 340.000    | 1.428.000.000  |              |
|    | d. Baliho   | 200%    | x | 50            | x | 2.004.000  | 200.400.000    |              |
|    | e. Papan Reklame Elektronik<br>( <i>videotron</i> )   | 1       | x | 50            | x | 23.088.000 | 1.154.400.000  |              |
| 8. | Bahan Kampanye  |         |   |               |   |            |                |              |
|    | a. Selebaran  | 50%     | x | 2.821.202     | x | 3.500      | 4.937.103.500  |              |
|    | b. Brosur   | 50%     | x | 2.821.202     | x | 3.500      | 4.937.103.500  |              |
|    | c. Pamflet  | 50%     | x | 2.821.202     | x | 3.500      | 4.937.103.500  |              |
|    | d. Poster   | 50%     | x | 2.821.202     | x | 10.500     | 14.811.310.500 |              |
| 9. | kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |         |   |               |   |            |                |              |
|    | a. Rapat Umum   | 60.000  | x | 2             | x | 43.000     | 5.160.000.000  |              |
|    | b. Kampanye melalui media sosial  | 7       | x | 2             | x | 25.000.500 | 350.007.000    |              |



| NO           | URAIAN KEGIATAN                  | RINCIAN |   |   |   | JUMLAH (Rp.) |                 |
|--------------|----------------------------------|---------|---|---|---|--------------|-----------------|
|              |                                  |         |   |   |   |              |                 |
|              | c. Kampanye melalui media daring | 7       | x | 2 | x | 3.000.000    | 42.000.000      |
| 10.          | Iklan                            |         |   |   |   |              |                 |
|              | a. Iklan TV                      | -       | x | - |   | -            | -               |
| <b>TOTAL</b> |                                  |         |   |   |   |              | 157.186.976.000 |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Pendidikan dan SDM,



ANAS STASIA JUWITA PUTRI

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.  
FAHMI IDRIS